

Upaya Abdul Karim Oey dalam Pembauran Orang Tionghoa di Indonesia, 1926-1988

Abdul Karim Oey's Efforts to Assimilate the Chinese in Indonesia, 1926-1988

Sekar Nur Astuty¹, Muhamad Shoheh², Angga Pusaka Hidayat³ ✉

¹²³ UIN Sultan Maulana Hasanuddin Serang, Banten

✉ angga.pusaka@uinbanten.ac.id

Article history:

Submitted: 12 Oktober 2023

Accepted: 28 Desember 2023

Published: 29 Desember 2023

Abstrak: Etnis Tionghoa adalah etnis yang telah lama menjadi bagian dari penduduk Nusantara. Orang Tionghoa menjalin interaksi dengan etnis lainnya sejak lama. Salah satu isu terkait etnis Tionghoa di Indonesia yang masih perlu diteliti adalah isu pembauran. Penelitian ini bermaksud untuk membahas upaya pembauran etnis Tionghoa yang dilakukan oleh Abdul Karim Oey pada 1926-1988. Abdul Karim Oey (Oey Tjeng Hien) adalah seorang Tionghoa peranakan yang muslim dan terlibat dalam upaya pembauran etnis Tionghoa di Indonesia sejak masa kolonial hingga Orde Baru. Metode sejarah digunakan dalam penelitian ini. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara. Penelitian ini menemukan bahwa Abdul Karim Oey berupaya membuka jalan pembauran bagi etnis Tionghoa di Indonesia melalui beberapa cara, yakni: Pertama, Abdul Karim Oey bergabung dengan organisasi Islam, Muhammadiyah. Kedua, dia terlibat dalam Penolong Korban Perang (PEKOPE) ketika terjadinya Perang Dunia II. Ketiga, dia mengambil peran dalam dunia politik dengan bergabung dalam partai Masyumi dan terlibat dalam pemerintahan. Keempat, dia berdakwah melalui organisasi Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI).

Kata Kunci: Abdul Karim Oey; Etnis Tionghoa; Islam; Pembauran.

Abstract: *The Chinese have long been part of the Indonesian population. Chinese people have interacted with other ethnicities for a long time. One issue related to Chinese ethnicity in Indonesia that still needs to be researched is the issue of assimilation. This research intends to discuss the efforts to assimilate Chinese ethnicity carried out by Abdul Karim Oey from 1926-1988. Abdul Karim Oey (Oey Tjeng Hien) is a Peranakan Chinese and quite a prominent Muslim figure in Indonesia. Abdul Karim Oey was involved in efforts to assimilate ethnic Chinese in Indonesia from the colonial period to the New Order. Historical methods are used in this research. Data was obtained through literature study and interviews. This research found that Abdul Karim Oey attempted to open a path for assimilation for ethnic Chinese in Indonesia through several methods: First, Abdul Karim Oey joined the Islamic organization Muhammadiyah. Second, during World War II, he was involved in Penolong Korban Perang/Helping War Victims (PEKOPE). Third, he took a political role by joining the Masyumi party and getting government involvement. Fourth, he preached through Persatuan Islam Tionghoa Indonesia/the Indonesian-Chinese Islamic Association (PITI).*

Keywords: *Abdul Karim Oey; Assimilate; Chinese; Islam.*

PENDAHULUAN

Etnis Tionghoa adalah salah satu kelompok etnis minoritas di Indonesia. Kata minoritas disini dikaitkan dengan jumlah mereka yang lebih kecil dibandingkan dengan beberapa etnis lainnya yang ada di Indonesia, seperti Jawa dan Sunda. Etnis Tionghoa sudah lama mendiami wilayah Nusantara. Serupa dengan bangsa asing pada umumnya, tujuan awal kedatangan bangsa Tionghoa ke Nusantara ialah untuk berdagang, di samping untuk misi kebudayaan dan agama. Bukti bahwa orang-orang Tionghoa sudah lama menjadi bagian dari Nusantara ialah informasi yang didapatkan dari prasasti-prasasti sebuah kerajaan di Jawa Timur, yang mana kerajaan tersebut dengan khusus membentuk pejabat yang mengurus orang-orang Tionghoa yang tinggal di kerajaan tersebut.¹

Interaksi yang terjalin diantara orang-orang Tionghoa dengan etnis lain di Nusantara telah berlangsung selama berabad-abad dan berjalan secara alami, mereka hidup saling membaaur dan membawa kebudayaan baru. Mereka turut berjasa dalam mentransformasikan sejumlah teknik dalam kehidupan sehari-hari di Nusantara. Orang-orang Tionghoa menempati Nusantara dengan berbagai profesi, mulai dari berdagang, bertani atau bertukang.² Keharmonisan hubungan antara orang-orang Tionghoa dengan pribumi mulai goyah tatkala kolonialisme masuk ke Nusantara. Pada masa pendudukan Belanda di Hindia Belanda (wilayah Nusantara), pemerintah memisahkan keberadaan orang-orang Tionghoa dengan bumiputra.³ Perilaku tersebut adalah salah satu contoh nyata adanya jiwa kompetisi sebagai sifat dasar manusia. Perwujudan jiwa kompetisi tersebut turut memperkeruh hubungan antara orang-orang Tionghoa dengan pribumi saat itu.

Pada masa kemerdekaan, pemerintah Indonesia menginginkan adanya integrasi masyarakat Indonesia. Salah satu usaha untuk mendekatkan orang Tionghoa peranakan dengan bumiputra yang ada di Indonesia dilakukan melalui proses pembauran (asimilasi). Dalam perjalanannya, usaha pembauran ini menemui hambatan yang salah satunya adalah faktor agama. Sebagaimana dinyatakan oleh Jose Cassanova (1994) bahwasannya agama akan melakukan proses transformasi berupa meninggalkan ruang privat (fungsi spiritual) dan mulai memasuki ruang public (masyarakat) untuk menjalankan fungsi sosial yang dimilikinya.⁴ Proses transformasi ini dijalankan oleh pemerintah Kolonial dengan cara menanamkan dalam benak orang-orang Tionghoa bahwasannya Islam sebagai agama mayoritas bumiputra adalah agama yang bukan main jeleknya.

¹ Marwati Djoened Poesponegoro and Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid 2* (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), 15.

² Leo Suryadinata, *Etnis Tionghoa Dan Nasionalisme Indonesia: Sebuah Bunga Rampai 1965-2008* (Jakarta: Kompas, 2010), 231.

³ Junus Jahja, *Islam Di Mata WNI* (Jakarta: Yayasan Haji Karim Oei, 1993), 7.

⁴ Ade Fitri Amalia, "Toleransi Beragama Dalam Praktek Sosial Masyarakat Mayoritas Dan Minoritas Agama Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember," *Al-Isnad: Journal of Islamic Civilization History and Humanities* 3, no. 30 (2022): 1-9.

Di sisi lain, bumiputra masih menyimpan prasangka yang kuat terhadap etnis Tionghoa.⁵ Situasi rumit terkait proses pembauran ini berusaha terus menerus diatasi.

Salah satu tokoh yang cukup berperan dalam menjembatani orang Tionghoa dan bumiputera adalah Abdul Karim Oey. Pria berkelahiran Padang, 6 Juni tahun 1905 merupakan Tionghoa peranakan yang mana kedua orang tuanya merupakan generasi pertama dari orang-orang Tionghoa yang bermigrasi ke Indonesia, dan menetap di Padang bersama imigran lainnya pada pertengahan abad ke-19.⁶ Sosok Abdul Karim Oey merupakan sosok yang berani beda dari lingkungannya. Dia memutuskan memeluk agama Islam, keyakinan mayoritas penduduk Indonesia. Dia konsisten berusaha memecahkan permasalahan pembauran etnis Tionghoa di Indonesia, antara lain, dengan konsep pembauran melalui penyebaran agama mayoritas.

Penelitian dan publikasi tentang Abdul Karim Oey sudah cukup banyak dilakukan, karya-karya yang sudah ada lebih banyak membicarakan kehidupan dan pemikiran Abdul Karim Oey. Akan tetapi, karya yang membicarakan upaya-upaya pembauran etnis Tionghoa di Indonesia oleh Abdul Karim Oey pada periode 1926-1988 masih belum banyak. Tulisan ini memusatkan perhatian pada upaya yang dilakukan oleh Abdul Karim Oey untuk mengusahakan pembauran etnis Tionghoa yang ada di Indonesia dengan pembatasan waktu tahun 1926 sampai dengan akhir hayatnya tahun 1988. Selanjutnya, tulisan ini membahas mengenai garis besar kehidupan Abdul Karim Oey, mengetahui gambaran kehidupan etnis Tionghoa di Indonesia 1926-1988, serta mengetahui apa saja keterlibatan Abdul Karim Oey dalam pembauran etnis Tionghoa di Indonesia berdasarkan pasang surut kondisi etnis Tionghoa di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai upaya pembauran etnis Tionghoa di Indonesia yang dilakukan oleh Abdul Karim Oey ini dilakukan dengan menggunakan metode sejarah. metode sejarah mencakup pemilihan topik, pengumpulan sumber, verifikasi (kritik sumber), interpretasi, dan penulisan sejarah (historiografi).⁷ Topik yang akan diteliti merupakan topik yang memiliki arti penting. Heuristik, yakni kegiatan mencari, menemukan, dan mengumpulkan sumber. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi dan kepustakaan atau *library research* yang relevan dengan pokok permasalahan. Wawancara dilakukan kepada beberapa narasumber, yakni anak bungsu dari Abdul Karim Oey, M. Ali Karim Oey dan ketua umum

⁵ Rochmawati, "Pembauran Yang Tak Pernah Selesai," *Jurnal Masyarakat dan Budaya* 6, no. 2 (2004): 105–118.

⁶ Leo Suryadinata, *Peranakan's Search for National Identity: Biographical Studies of Seven Indonesian Chinese* (Singapore: Times Academic Press, 1993), 105.

⁷ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2005), 90.

Pembina Iman Tauhid Islam (PITI) masa khidmat 2022-2027, Serian Wijatno. Tahap kedua adalah kritik sumber atau verifikasi. Pada tahap ini peneliti menilai keaslian sumber serta kapabilitas informasi yang terkandung dalam sumber tersebut. Data yang diperoleh kemudian dihubungkan satu dengan lainnya melalui proses interpretasi.

Interpretasi historis adalah sintesis dan analisis serta generalisasi dalam tingkatan terbatas. Pada tahap interpretasi ini kisah sejarah dirangkai secara logis. Tahap terakhir adalah menuliskan kisah sejarah. Rekonstruksi atas peristiwa sejarah berdasarkan bukti-bukti dituliskan menjadi suatu karya sejarah atau historiografi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Abdul Karim Oey

Oey Tjeng Hien adalah nama lahir Abdul Karim Oey, lahir di Padang, Sumatera Barat pada 6 Juni 1905. Di kampung kelahirannya, Oey Tjeng Hien sejak kecil sampai beranjak remaja akrab dipanggil dengan sebutan “Baba Adek” atau “Babadek”. Sebutan ini diberikan karena Oey Tjeng Hien memiliki seorang kakak yakni Siauw Sam Ho yang akrab dipanggil dengan sebutan “Baba Didong”.⁸ Oey Tjeng Hien merupakan anak kedua dari dua bersaudara, ayahnya bernama Oey Tiang Seng dan ibunya bernama Gho Soean Nio. Keluarga ayah dan ibu Oey Tjeng Hien berasal dari suku Hokkian (Tiongkok), dan bertempat tinggal di daerah belakang Tangsi. Daerah yang dikenal dengan pemukiman penduduk Tionghoa pada masa itu. Oey Tjeng Hien sedari kecil sudah diberikan oleh ibunya kepada kakak dan kakak iparnya, yakni Gho Loan Eng untuk dirawat. Maka sejak kecil, Oey Tjeng Hien menganggap bahwa kedua orang tua kandungnya adalah nenek dan kakeknya.⁹

Kedua orang tua Oey Tjeng Hien adalah pengusaha emas yang sukses. Masyarakat Tionghoa dan bumiputra menyegani keluarga Babadek bukan hanya karena usahanya yang sukses, tetapi juga karena jiwa sosialnya yang tinggi. Ibu Oey Tjeng Hien selalu mengulurkan tangan dan bantuan ketika ada tetangga atau kenalan yang mengadakan keramaian, perkawinan, atau mendapat musibah. Sifat tersebut juga turun kepada anaknya, yakni Oey Tjeng Hien.¹⁰ Padang, tempat lahir dan tinggal Babadek dikenal sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya agama Islam. Meski begitu, ayah dan ibu Oey Tjeng Hien belum mengenal Islam lebih jauh. Hal ini disebabkan pengaruh pemerintah kolonial yang menanamkan pada orang-orang Tionghoa bahwa Islam

⁸ Abdul Karim Oey Tjeng Hien, *Mengabdi Agama, Nusa, Dan Bangsa: Sahabat Karib Bung Karno*, 1st ed. (Jakarta: Gunung Agung, 1982), 4.

⁹ Suryadinata, *Peranakan's Search for National Identity: Biographical Studies of Seven Indonesian Chinese*, 105.

¹⁰ Hien, *Mengabdi Agama, Nusa, Dan Bangsa: Sahabat Karib Bung Karno*, 6.

diasosiasikan dengan kelas sosio-ekonomi yang rendah. Hal tersebut membuat tidak banyaknya ketertarikan orang Tionghoa terhadap Islam.¹¹

Oey Tjeng Hien mengenyam pendidikan di sekolah bahasa *Holland Chinese School* (selanjutnya disebut HCS) Padang selama 7 tahun. HCS banyak dipilih oleh anak-anak Tionghoa peranakan karena sekolah ini memiliki keunggulan dari sisi akademik, tenaga pengajar didatangkan dari Belanda, selain itu juga HCS dinilai melahirkan lulusan dengan status sosial lebih tinggi dibandingkan dengan lulusan sekolah *Tiong Hoa Hwe Tong* (selanjutnya disebut THHT).¹² Selesai menamatkan pendidikan formalnya, Oey Tjeng Hien memilih untuk mengambil kursus dagang. Sebab, sedari kecil Oey Tjeng Hien memang sudah tertarik dengan dunia perdagangan, yang pada kemudian hari membawa dirinya menjadi seorang pengusaha sukses.

Menginjak usia kepala dua, Oey Tjeng Hien mulai berkeinginan untuk merantau keluar dari kota kelahirannya.¹³ Berbekal pengetahuannya di bidang ilmu bumi dan sejarah ia mengetahui sebuah wilayah bernama Bintuhan, kota kecil yang ada di Bengkulu. Keinginannya pergi merantau ialah karena jiwanya yang mulai resah untuk mencari pengalaman. Tujuan utamanya ialah untuk berdagang, sebab Bintuhan merupakan kota yang terletak dipinggir laut sudah pasti akan disinggahi kapal-kapal dagang, hal itu sangat berpotensi bagi pedagang sepertinya. Selain itu, Bintuhan dipilih karena memang di kota tersebut terdapat famili dari Oey Tjeng Hien. Diketahui pula bahwa di Bintuhan terdapat rempah-rempah dan hasil bumi lainnya, hal ini menabuh daya tarik untuk merantau kesana. Disampaikannya pengetahuan tersebut kepada ayah dan kakaknya. Dengan malalui perbincangan dan pertimbangan yang panjang akhirnya Oey Tjeng Hien diperbolehkan untuk merantau ke Bintuhan. Sekitar awal tahun 1926 Oey Tjeng Hien meninggalkan Padang.¹⁴

Setibanya di Bintuhan, Oey Tjeng Hien tidak menemui banyak kesukaran. Sebab, disana banyak teman-teman seprofesi dan seketurunannya. Kehidupan Oey Tjeng Hien di Bintuhan tidak jauh berbeda dengan di Padang ia tetap berbaur dengan bumiputra di samping menjalankan usahanya, ia juga tetap aktif menjalankan kegiatan sosial. Oey Tjeng Hien berusaha untuk membuang jauh-jauh sifat kaku dan eksklusif yang pada saat itu banyak diagungkan oleh golongannya.¹⁵ Satu aspek kehidupan Oey Tjeng Hien yang mengalami perubahan ialah keimanannya. Setelah dua tahun mendiami Bintuhan, Oey Tjeng Hien mulai mengalami perdebatan dalam batinnya. Perdebatan tersebut mempertanyakan mengenai kepercayaan yang selama ini ia

¹¹ Suryadinata, *Peranakan's Search for National Identity: Biographical Studies of Seven Indonesian Chinese*, 106.

¹² Ratna Danyati and Samuel Budiman, "Peranan Sekolah Tiong Hoa Hwe Koan Dan Hollandsch Chineesch School Terhadap Etnis Tionghoa," *Jurnal Cakrawala* 12, no. 1 (2012): 17–24.

¹³ Ali Karim Oey, "Di Wawancarai Oleh Sekar Nur Astuty," 2023.

¹⁴ Hien, *Mengabdi Agama, Nusa, Dan Bangsa: Sahabat Karib Bung Karno*, 11.

¹⁵ Oey, "Di Wawancarai Oleh Sekar Nur Astuty."

peluk, yakni kepercayaan kepada Yesus Kristus, ia merupakan penganut Advent. Selama dua tahun itu pula, Oey Tjeng Hien hampir tidak pernah lagi menjalani ibadah menurut ajaran Kristen. Penyebabnya ialah karena di kota kecil Bintuhan tersebut tidak ada gereja untuk upacara kebaktian hari Minggu.¹⁶

Dengan rasa ingin tahu yang tinggi, Oey Tjeng Hien melakukan perbandingan beberapa kepercayaan. Dari beberapa agama yang dipelajarinya tersebut ia menaruh ketertarikan pada Islam. Alasannya ialah karena Islam yang dianggap mudah. Islam tidak banyak memberatkan orang-orang seperti dirinya. Dengan kemantapan hatinya, selanjutnya Oey Tjeng Hien mengucapkan dua kalimat syahadat di hadapan Ustadz Abdul Kadir. Nama Abdul Karim Oey didapatkan setelah Oey Tjeng Hien menjadi mualaf. Meskipun sempat dikekang oleh keluarganya mengenai kepindahan keyakinannya, Abdul Karim Oey tidak gentar. Ia mempraktikkan ajaran Islam yang bersikap lemah lembut kepada orang yang berbeda kepercayaan dengannya. Kesabaran Abdul Karim Oey akhirnya membuahkan hasil, setelah melalui perjalanan panjang ditentang oleh keluarganya. Akhirnya, ayah, kakak, serta beberapa keluarga Abdul Karim Oey mendapatkan hidayah dan memutuskan mengikuti jejak Abdul Karim Oey dengan memeluk Islam.¹⁷

Gambar 1. Foto Abdul Karim Oey



Sumber: Koleksi Keluarga, repro oleh Sekar Nur Astuty, 21 Maret 2023

Gambaran Umum Etnis Tionghoa di Indonesia Tahun 1926-1988

Etnis Tionghoa Pada Masa Sebelum Kemerdekaan (1926-1945)

Pada tahun 1926, Hindia Belanda berada pada masa politik reaksioner. Setelah sebelumnya politik etis tidak sepenuhnya berhasil. Meskipun gagal, politik etis memberikan dampak, yakni terlahirnya kaum intelektual di Hindia Belanda yang kemudian membangkitkan pergerakan nasional. Bagi

¹⁶ Hien, *Mengabdikan Agama, Nusa, Dan Bangsa: Sahabat Karib Bung Karno*, 14.

¹⁷ Oey, "Di Wawancarai Oleh Sekar Nur Astuty."

kalangan Tionghoa, masa politik etis ini menjadi puncak dari sentimen anti Tionghoa, yang mana pemerintah kolonial merasa tersaingi akibat orang-orang Tionghoa yang banyak berhasil dalam kegiatan ekonomi.¹⁸ Pemerintah kolonial membuat beberapa kebijakan yang berupaya memisahkan masyarakat bumiputra dengan Tionghoa. Untuk membatasi mobilisasi orang-orang Tionghoa, pemerintah kolonial menerapkan kebijakan *Passenstelsel* serta *Wijkenstelsel*.¹⁹

Ketika muncul gerakan proto-nasionalis (1908-1926) di Indonesia, etnis Tionghoa telah dikeluarkan dari gerakan. Hal ini ditandai dengan kemunculan dari gerakan *Tiong Hoa Hwee Koan*²⁰ (selanjutnya disebut THHK) pada tahun 1900-an di Jawa.²¹ Nasionalisme Tionghoa memang sudah ada lebih dulu dibanding dengan kemunculan organisasi proto-nasionalis Indonesia. Pada fase nasionalisme Indonesia (1927-1942), yang ditandai dengan kemunculan partai nasional, nama bangsa, bahasa, bendera, bahkan lagu kebangsaan, etnis Tionghoa jarang juga disebut.

Berkembangnya nasionalis di negeri Tiongkok memberikan dampak kepada orang-orang keturunan Tionghoa di Hindia Belanda. Untuk menghalau lahirnya sifat nasionalis, pemerintah kolonial mulai memberikan perhatian khusus kepada masyarakat Tionghoa. Perhatian itu berupa hubungan dagang antara pihak kolonial dengan orang-orang Tionghoa, pemberian hak monopoli dan pemungutan pajak.²² Di sisi lain, perhatian khusus ini menimbulkan sentimen rasialis. Penduduk bumiputra menganggap bahwa orang-orang Tionghoa adalah orang suruhan yang dipercayai Belanda. Realitanya, orang-orang Tionghoa masa kolonial mempunyai peran yang terbatas dalam kegiatan perekonomian, yakni hanya menjaga agar ekonomi kolonial tetap berjalan lancar sebagai perantara dan pengawas.²³ Kondisi ini membentuk pola sistem regresi etnis dan pembagian kerja etnis.

Dalam bidang pendidikan, THHK mengadakan pendidikan bagi anak-anak Tionghoa. Sekolah THHK dikenal dengan THHT yang didirikan pada tahun 1901.²⁴ Sekolah ini bertujuan untuk menyebarkan ajaran *Khong Hu Chu* sebagai upaya men-Tionghoakan kembali orang-orang Tionghoa peranakan dan juga sebagai protes kepada pemerintah Hindia-Belanda karena tidak

¹⁸ Ong Hok Ham, *Riwayat Tionghoa Peranakan Di Jawa*, 2nd ed. (Jakarta: Komunitas Bambu, 2009), 30.

¹⁹ Mely G. Tan, *Etnis Tionghoa Di Indonesia: Kumpulan Tulisan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 14.

²⁰ Perhimpunan Tionghoa pertama di Jawa, diresmikan oleh Gubernur Jenderal Kolonial Belanda pada 3 Juni 1900 di Batavia. Bertujuan untuk memperkenalkan reformasi budaya dan social berdasarkan konfusianisme. Turut terlibat dalam reformasi sosial, agama, dan pendidikan.

²¹ Leo Suryadinata, *Pribumi Indonesians, The Chinese Minority and China*, 3rd ed. (Singapore: Heinemann Asia, 1992), 12.

²² Iskandar Jusuf, *Jalan Panjang Asimilasi Etnis Tionghoa* (Tangerang: Sekolah Terpadu Paha, 2016), 63.

²³ Nurani Soyomukti, *Soekarno & Cina: Nasionalisme Tionghoa Dalam Revolusi Indonesia, Soekarno Dan Poros Jakarta-Peking, Sikap Bung Karno Terhadap Etnis Tionghoa Di Indonesia* (Yogyakarta: Garasi, 2012), 177.

²⁴ Leo Suryadinata, *Prominent Indonesian Chinese in The Twentieth Century: A Preliminary Survey* (Ohio: Center for International Studies Ohio University, 1972), 61.

tersedinya sekolah untuk orang Tionghoa.²⁵ Merespons kehadiran THHT, pemerintah Hindia Belanda dengan segera mendirikan sekolah untuk anak Tionghoa bernama *Holandsch Chineesche School* (HCS) di Batavia dengan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar dan tidak memuat pelajaran bahasa Tionghoa ataupun yang mengandung unsur kebudayaan Tionghoa. HCS berkembang di kota-kota besar Hindia Belanda. Namun, tidak semua anak Tionghoa dapat mengakses HCS karena biaya yang dikenakan sangat tinggi.

Pada awal masa pendudukan Jepang pernah terjadi peristiwa penangkapan terhadap sekitar 500 orang Tionghoa terkemuka. Mereka kemudian ditahan di Penjara Cimahi.²⁶ Peristiwa ini kemudian melahirkan kesadaran etnis yang semakin menguat di kalangan orang Tionghoa. Pemerintah Jepang dengan cepat mengubah struktur kolonial Belanda yang sebelumnya diterapkan di Hindia-Belanda. Seluruh partai politik yang pro Belanda, Tiongkok, atau Indonesia dilarang. Selama pendudukan Jepang, sekolah-sekolah Belanda dilarang beroperasi dan penggunaan Bahasa Belanda dilarang. Dengan ditutupnya sekolah-sekolah Belanda, Tionghoa peranakan hanya dapat menyekolahkan anak-anak mereka ke sekolah Tionghoa atau sekolah bagi bumiputra.²⁷ Perubahan kebijakan ini cukup mempengaruhi anak-anak Tionghoa yang lahir pada akhir tahun 1930-an.

Etnis Tionghoa masa Orde Lama (1945-1965)

Memasuki masa pasca kemerdekaan, pada tahun-tahun awal masih terasa pengaruh kekuasaan pemerintah asing di Indonesia. Hasil produk atas kebijakan pemerintah Hindia-Belanda membuat batasan antara bumiputra dan orang-orang Tionghoa masih sangat terasa. Upaya untuk menghapuskan keterpisahan tersebut sudah banyak dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Namun, stereotip dan prasangka kepada orang-orang Tionghoa tetap ada, yang kemudian menimbulkan tindakan-tindakan diskriminatif dalam hak dan kewajiban kepada minoritas dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi.²⁸ Bukti nyata adanya tindak diskriminatif pada masa setelah kemerdekaan, tercermin pada pemerintah Indonesia dalam menerapkan kebijakan nasional. Pasca kemerdekaan Indonesia banyak terjadi revolusi bagi orang Tionghoa. Meskipun revolusi melawan Belanda menjadi salah satu peristiwa yang paling menentukan telah dilalui. Namun, bagi orang Tionghoa banyak revolusi lain yang kemudian membawa kehancuran besar atas kehidupan dan

²⁵ Noor Isnaeni, "Perkembangan Pendidikan Anak-Anak Tionghoa Pada Abad 19 Hingga Akhir Orde Baru Di Indonesia," *Khasanah Ilmu: Jurnal Pariwisata dan Budaya* 3, no. 2 (2012).

²⁶ Tan, *Etnis Tionghoa Di Indonesia: Kumpulan Tulisan*, 6.

²⁷ Suryadinata, *Pribumi Indonesians, The Chinese Minority and China*, 89.

²⁸ H. S Suhaedi et al., *Etnis Cina Di Banten* (Banten: LP2M IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2015), 133.

harta benda. Banyaknya perbedaan kondisi antara sebelum kemerdekaan dengan setelah kemerdekaan membuat tidak sedikit masyarakat Tionghoa enggan menunjukkan identitasnya.

Di samping keterkaitan Indonesia dengan orang-orang Tionghoa, Indonesia setelah merdeka juga memiliki sejarah hubungan dengan negara Tiongkok. pada masa pemerintahan Soekarno terjadi pasang surut hubungan Indonesia dengan negara leluhur orang Tionghoa tersebut. Dalam masa kepemimpinannya, Soekarno memiliki sejumlah orang yang berasal dari etnis Tionghoa untuk mengisi berbagai posisi kabinetnya dari tahun 1947 hingga 1965, seperti Menteri urusan minoritas, keuangan, negara, kesehatan, tata kota dan pembangunan.²⁹ Kemerdekaan Indonesia juga berpengaruh pada kehidupan politik orang Tionghoa. Pada tahun 1949, banyaknya partai politik bumiputra yang sebelumnya tidak membuka diri kepada non-bumiputra menjadi terbuka terhadap peranakan Tionghoa.

Beberapa kebijakan yang dinilai diskriminasi terhadap orang-orang Tionghoa di Indonesia tersebar pada beberapa kabinet kepemimpinan ialah kebijakan “Program Benteng”, dengan tujuan untuk mengembangkan pengusaha bumiputra guna membangun ekonomi Indonesia.³⁰ Dari program ini hanya ada beberapa pengusaha bumiputra yang berhasil, sebagian pengusaha bumiputra lainnya menjual lisensi dari program ini kepada pengusaha asing (Tionghoa) yang kemudian melahirkan perusahaan-perusahaan Ali Baba.³¹ Pola perusahaan Ali Baba ini ialah dengan mengelabui hukum yang membatasi kepemilikan dari etnis Tionghoa. Kebijakan selanjutnya ialah berkaitan dengan perjanjian kewarganegaraan ganda antara Tiongkok dan negara Asia Tenggara yang dibuat pada bulan April 1955. Dalam perjanjian tersebut, untuk pertama kalinya dalam sejarah Tiongkok, Tiongkok meninggalkan klaim tradisionalnya mengenai semua orang Tionghoa di perantauan adalah warga negaranya. Dan dalam perjanjian tersebut pula disebutkan bahwa warga negara RRT yang berada di Indonesia harus mematuhi hukum dan kebiasaan negara setempat dan tidak diperkenankan untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik di negara leluhur mereka.³²

Keppres No. 10 Tahun 1959 mengenai pelarangan etnis Tionghoa menjalankan bisnis atau perdagangan eceran di bawah kabupaten. Peraturan ini menjadi puncak dari tekanan yang dialami oleh orang-orang Tionghoa. Selama tahun 1960-an ada sekitar 136.000 orang Tionghoa yang memutuskan untuk meninggalkan Indonesia yang dibantu oleh pemerintah Tiongkok.³³ Pada bulan

²⁹ Leo Suryadinata, *Prominent Indonesian Chinese: Biographical Sketches* (Singapore: institute of Southeast Asian Studies, 1995), 65.

³⁰ Soyomukti, *Soekarno & Cina: Nasionalisme Tionghoa Dalam Revolusi Indonesia, Soekarno Dan Poros Jakarta-Peking, Sikap Bung Karno Terhadap Etnis Tionghoa Di Indonesia*, 181.

³¹ Perusahaan Ali Baba adalah kolaborasi antara “Ali” orang Indonesia sebagai imortir nasional dan “Baba” orang Tionghoa dengan kecerdasan bisnis, jaringan perdagangan, dan modal.

³² Suryadinata, *Pribumi Indonesians, The Chinese Minority and China*, 171.

³³ Tan, *Etnis Tionghoa Di Indonesia: Kumpulan Tulisan*, 12.

Mei 1963, terjadi ledakan anti-Cina banyak terjadi di wilayah Jawa Barat. Pada ledakan tersebut yang menjadi sasaran ialah properti-properti yang serius. Hal ini memancing reaksi dari Peking. Pemerintah Peking menganggap Indonesia melakukan pelanggaran pada perjanjian Dwi Kewarganegaraan yang ditandatangani tahun 1955. Dengan banyaknya pro dan kontra. Akhirnya, Peking memutuskan untuk meletakkan kepentingan politik luar negerinya diatas kepentingan orang Tionghoa perantauan di Indonesia. Lepas dua tahun dari ledakan anti-Cina tersebut, di bulan September 1965, terjadi kudeta yang gagal dilancarkan. Dalam hal ini, etnis Tionghoa kembali terjebak di tengah kekisruhan tersebut. Peristiwa G 30/S menjadi trauma tersendiri bagi Etnis Tionghoa.³⁴

Etnis Tionghoa masa Orde Baru (1965-1988)

Tahun 1965 menjadi tahun dengan penuh pergolakan di dalam politik Indonesia, yakni adanya peralihan dari masa orde lama ke orde baru. Di awal kepemimpinan Soeharto, hubungan mesra yang terjalin antara Indonesia dan RRT mesti berakhir. Setelah tahun 1967, hubungan diplomatik antara Indonesia dengan RRT dibekukan dan tidak dilanjutkan sampai dengan nota kesepahaman ditandatangani oleh masing-masing Menteri Luar Negeri pada tanggal 8 Agustus 1990 mendatang.³⁵ Pada masa Suharto, etnis Tionghoa diberi hak istimewa untuk mengembangkan ekonomi negara (dan kekayaan mereka sendiri). Tetapi, secara paradoks dipinggirkan dan didiskriminasi di semua bidang sosial, budaya, bahasa, politik, pendidikan, pelayanan publik, dan pekerjaan publik.³⁶

Terjadinya perubahan secara fundamental mengenai kebijakan yang mengatur etnis Tionghoa bersamaan dengan larangan mengenai segala sesuatu yang berbau Tionghoa. Larangan tersebut meliputi kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat istiadat Tionghoa. Sebagaimana yang dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 14 tahun 1967. Selain itu, ada pula kecurigaan serta stigma bahwa masyarakat keturunan Tionghoa masih memiliki ikatan yang kuat dengan tanah leluhurnya sehingga rasa nasionalisme mereka terhadap Negara Indonesia patut diragukan. Akibat yang timbul dari kecurigaan tersebut adalah keluarnya kebijakan yang sangat diskriminatif terhadap masyarakat Tionghoa baik dalam bidang politik maupun sosial budaya.³⁷

³⁴ La Ode M. D, *Trilogi Pribumisme: Revolusi Konflik Pribumi Dengan Non-Pribumi Di Berbagai Belahan Dunia*, 1st ed. (Jakarta: Komunitas Ilmu Pertahanan Indonesia, 2018), 142.

³⁵ Tan, *Etnis Tionghoa Di Indonesia: Kumpulan Tulisan*, 25.

³⁶ Chang Yau Hoon, *Chinese Identity in Post-Suharto Indonesia: Culture, Politis and Media* (Brighton: Sussex Academic, 2011), 1.

³⁷ M. D, *Trilogi Pribumisme: Revolusi Konflik Pribumi Dengan Non-Pribumi Di Berbagai Belahan Dunia*, 143.

Beberapa kebijakan yang turut menambah diskriminasi etnis Tionghoa ialah Inpres No. 14 Tahun 1967, dikeluarkan juga Surat Edaran No. 06/Preskab/6/67 yang memuat tentang perubahan nama. Selain itu, penggunaan Bahasa Tionghoa pun di larang. Hal ini dituangkan ke dalam Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 286/KP/XII/1978.³⁸ Bukan hanya itu saja, gerak gerik masyarakat Tionghoa pun diawasi oleh sebuah badan yang bernama Badan Koordinasi Masalah Cina (BKMC) yang menjadi bagian dari Badan Koordinasi Intelijen (Bakin).³⁹ Sejak tahun 1967, warga keturunan Tionghoa dianggap sebagai warga negara asing di Indonesia dan kedudukannya berada di bawah warga bumiputra, yang secara tidak langsung menghapus hak-hak asasi mereka. Contohnya ialah semua sekolah Tionghoa dilarang di Indonesia. Sejak saat itu, semua anak Tionghoa Indonesia harus menerima pendidikan seperti anak orang Indonesia baik sekolah negeri maupun swasta, mengikuti kurikulum nasional.

Dampak yang ditimbulkan dari kebijakan pada masa orde baru yang berlangsung selama 32 tahun ialah masyarakat Tionghoa yang tidak dapat menikmati kebudayaan mereka sendiri.⁴⁰ Satu-satunya surat kabar berbahasa Mandarin yang diizinkan terbit adalah Harian Indonesia yang sebagian artikelnya ditulis dalam bahasa Indonesia. Harian ini dikelola dan diawasi oleh militer Indonesia dalam hal ini adalah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Agama tradisional Tionghoa tidak luput dari larangan. Akibatnya, agama *Konghucu* kehilangan pengakuan pemerintah. Selama kurang lebih 30 tahun diberlakukannya kebijakan asimilasi total secara konsisten oleh presiden Soeharto di zaman orde baru telah berhasil mengurangi jumlah orang yang menguasai bahasa Mandarin, terutama pada generasi muda. Perpindahan ke Kristen dan sebagian kecil ke Islam pada golongan Tionghoa yang lebih muda, membuat mereka jauh dari agama Tionghoa atau Tri Dharma. Di samping pemberlakuan kebijakan asimilasi, pemerintah Soeharto juga menerapkan peraturan yang diskriminatif bagi orang-orang Tionghoa. Peraturan diskriminatif bahkan mengatur mengenai dokumen kewarganegaraan orang-orang Tionghoa. Diskriminasi nyata terlihat dengan adanya Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (selanjutnya disebut SBKRI).⁴¹

³⁸ Surya Agung, *Agamaku Terbang Tinggi* (Surabaya: Inspirasi, 2001), 71.

³⁹ M. D, *Trilogi Pribumisme: Revolusi Konflik Pribumi Dengan Non-Pribumi Di Berbagai Belahan Dunia*, 143.

⁴⁰ J Babari and Albertus Sugeng, *Diskriminasi Rasial Etnis Tionghoa Di Indonesia* (Jakarta: Gandi, 1999), 73-74.

⁴¹ SBKRI merupakan konsekuensi dari perjanjian Dwi Kewarganegaraan antara Indonesia dengan RRT pada tahun 1995. SBKRI pertama kali dimuat dalam ketentuan penutup UU No. 62 Tahun 1958, tentang Kewarganegaraan RI.

Keterlibatan Abdul Karim Oey dalam Pembauran Etnis Tionghoa di Indonesia Tahun 1926-1988: Aktif dalam Muhammadiyah

Ikut bergabungnya Abdul Karim Oey dalam Muhammadiyah menjadi salah satu upayanya dalam pembauran etnis Tionghoa di Indonesia. Sebagaimana stereotipe bumiputra bahwa orang-orang Tionghoa adalah orang-orang yang hanya ingin mencari kekayaan di Indonesia, Abdul Karim Oey hendak membuktikan bahwa hal tersebut salah. Kontribusi yang dilakukan Abdul Karim Oey mulai dari yang semata-mata untuk keberlangsungan aktivitas Muhammadiyah sampai dengan upaya yang berguna dalam pembauran etnis Tionghoa di Indonesia. Beberapa upaya yang dilakukan, pertama Abdul Karim Oey menjadi donatur Muhammadiyah. Pendanaan Muhammadiyah Bintuhan banyak disokong oleh dana pribadi Abdul Karim Oey selaku ketua. Pembiayaan tersebut dialokasikan untuk pendirian, pengkaderan, dan semua amal usaha pergerakan.⁴² Kedua, mengembangkan sekolah standar Muhammadiyah. Sekolah standar Muhammadiyah menjadi salah satu sekolah proto nasional karena sudah ada sebelum masa kemerdekaan. Pengembangan sekolah standar oleh Abdul Karim Oey dilakukan dengan cara mendatangkan tenaga pengajar dari luar kota, seperti Jawa dan Padang. Di samping itu, ikut mengajar pula H. Fakir Daud yang tak lain adalah guru agama Abdul Karim Oey.⁴³ Meskipun berdiri lebih akhir dibanding sekolah Belanda. Namun, sekolah ini mampu bersaing dengan sekolah bentukan Belanda. Untuk materi ajar, di samping materi umum diajarkan pula materi mengenai agama Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan hadist. Abdul Karim Oey memperbolehkan anak Tionghoa untuk ikut belajar di sekolah standar Muhammadiyah ini, karena pembelajarannya berlandaskan Al-Qur'an dan hadist, maka syaratnya ialah dengan memeluk Islam terlebih dahulu.

Selain itu, Abdul Karim Oey memberikan nasihat-nasihat kepada banyak keluarga Muhammadiyah. Sebab, Abdul Karim Oey menyadari bahwa dirinya memiliki kedudukan yang penting dan akan banyak orang yang mendengarkan dan mengikuti. Berdasarkan macam-macam teori pembauran yang ada, upaya-upaya yang dilakukan oleh Abdul Karim Oey melalui perkumpulan Muhammadiyah ini termasuk pada pembauran struktural. Sebagaimana yang dikatakan oleh Gordon, bahwasannya pembauran terbagi atas tujuh tingkatan, pembauran struktural masuk pada tingkatan kedua.⁴⁴ Di sebutkan bahwa tingkatan struktural ialah ketika minoritas memasuki perkumpulan, lembaga atau kelompok mayoritas. Abdul Karim Oey telah berhasil menjadi bagian dari perkumpulan Muhammadiyah dan diterima baik di dalamnya.

⁴² Oey, "Di Wawancarai Oleh Sekar Nur Astuty."

⁴³ Selpi Gusria, "Kiprah H. Abdul Karim (Oey Tjeng Hien) Dalam Bidang Sosial Keagamaan Di Bintuhan Pada Tahun 1926-1938" (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2019), 52.

⁴⁴ Komsahrial Romli, "Akulturasi Dan Asimilasi Dalam Konteks Interaksi Antar Etnis," *Jurnal Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 8, no. 1 (2015), 3.

Perkumpulan Muhammadiyah sendiri merupakan sebuah perkumpulan besar yang diikuti oleh banyak mayoritas etnis penduduk Hindia Belanda. Abdul Karim Oey juga banyak berupaya dalam menyatukan orang-orang Tionghoa di masa itu dengan mencoba menghilangkan garis rasial diantara orang-orang Tionghoa dengan golongan ketiga masyarakat dalam hukum Belanda. Semasa aktif di Muhammadiyah Bengkulu, Abdul Karim Oey berkarib dengan HAMKA dan Soekarno. Hal ini nampak dalam foto tahun 1938 berikut:

Gambar 2. Foto Tiga Sekawan Tergabung dalam Muhammadiyah Bengkulu (kiri ke kanan: HAMKA, Karim Oey, Soekarno)



Sumber: Koleksi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Mendirikan Penolong Korban Perang (PEKOPE)

Terjadi ketika masa peralihan kekuasaan Hindia Belanda dari kolonial Belanda kepada tentara Jepang. Saat itu, Perang Dunia II yang sedang meletus di daratan Eropa mulai menyebar ke Timur, dan pemerintah Belanda merasa tidak akan sanggup membendung serangan tentara Jepang tersebut.⁴⁵

Gambar 3. Salah Satu Berita Kekalahan tentara Hindia-Belanda



Sumber: *Asia Raya*, No. 57, Terbitan 09 Maret 1943

⁴⁵ Beni Ahmad Muharam, “Operasi Detachment: Operasi Militer Amerika Serikat Dan Iwo Jima (19 Februari - 26 Februari 1945)” (Universitas Pendidikan Indonesia, 2018), 1.

Melihat kondisi yang demikian, maka untuk mengurangi resiko banyaknya korban jiwa terutama di Bengkulu. Soekarno, Abdul Karim Oey dan dokter Djamil dipanggil oleh Residen Belanda untuk Bengkulu. Dalam pemanggilan tersebut, Residen Hooyekast, menceritakan mengenai kekejaman tentara Jepang. Selain itu, dijelaskan juga bahwasannya ketika nanti tentara Jepang telah sampai di Bengkulu, maka orang-orang Belanda akan pergi meninggalkan Bengkulu. Sehingga, hanya ada penduduk setempat, dan nasibnya dititipkan kepada bung Karno, Abdul Karim Oey dan dokter Djamil. Dengan segera dibentuklah Pekope dengan Abdul Karim Oey sebagai ketuanya. Alasan Abdul Karim Oey berkenan menjadi ketua Pekope ialah karena sebagai upaya untuk melindungi orang-orang Tionghoa yang ada di Bengkulu saat itu. Tentara Jepang memang banyak menangkap dan menyiksa orang-orang berkulit putih dan bermata sipit. Sebab, dianggap sebagai orang Belanda. upaya perlindungan tersebut dilakukan dengan menempatkan orang-orang Tionghoa tersebut di kawasan pemukiman masjid Muhammadiyah Kebon Ros Bengkulu.⁴⁶

Gambar 4. Masjid Muhammadiyah Kebon Ros Bengkulu



Sumber: Koleksi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Terlibat dalam Pemerintahan Pasca Kemerdekaan

Setelah masa kemerdekaan, Abdul Karim Oey menduduki beberapa jabatan di pemerintahan. Pertama, di awal tahun kemerdekaan, yakni pada tahun 1945. Abdul Karim Oey dipilih menjadi anggota dari Komite Nasional Indonesia Pusat (selanjutnya disebut KNIP) sebagai perwakilan dari wilayah Bengkulu. Keanggotaan KNIP dipilih berdasarkan penunjukan yang diusulkan oleh para perintis kemerdekaan dan tokoh-tokoh politik yang aktif dalam gerakan kemerdekaan. Fungsi dari KNIP sendiri ialah membantu kegiatan presiden. Jabatan KNIP Abdul Karim Oey ini berakhir sampai dengan tahun 1949. Periode KNIP berakhir dan digantikan oleh periode DPR dan Senat Republik Indonesia Serikat.⁴⁷ Jabatan selanjutnya yang Abdul Karim Oey pernah duduki ialah

⁴⁶ Hien, *Mengabdi Agama, Nusa, Dan Bangsa: Sahabat Karib Bung Karno*, 37.

⁴⁷ Sekretariat Jendral DPR RI, "Tentang Sejarah DPR," *Website Instansi*.

jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mewakili etnis Tionghoa. Jabatan tersebut diberikan dan diangkat oleh Presiden Soekarno. Abdul Karim Oey menjabat sebagai DPR mulai dari tahun 1956 sampai dengan tahun 1959.

Dengan kedudukannya sebagai DPR tersebut Abdul Karim Oey mencoba menghapus garis rasial antara orang-orang Tionghoa di Indonesia, yang sebenarnya semua itu hanyalah warisan dari pihak kolonial Belanda guna melanggengkan kekuasaannya. Keikutsertaan Abdul Karim Oey dalam pemerintahan memberikan bukti bahwasannya sebagai seorang minoritas Tionghoa tetap bisa berkontribusi bagi Indonesia. Selama aktif pada jabatan tersebut, Abdul Karim Oey tetap berusaha untuk melakukan pembauran dikalangan etnis Tionghoa di Indonesia. Sebab, Abdul Karim Oey masih terus memberikan nasihat-nasihat sebagaimana yang dahulu ia lakukan semasa aktif di kepengurusan Muhammadiyah.

Bergabung dengan Masyumi pada Masa Revolusi Fisik

Belanda dan Jepang tidak terima begitu saja atas kemerdekaan Indonesia, mereka terus berusaha untuk bisa kembali menguasai Indonesia. Bengkulu menjadi wilayah yang tidak luput dari incaran bangsa asing. Sebab, di Bengkulu memiliki sumber daya alam yang melimpah. Setelah kemerdekaan, Indonesia memasuki masa revolusi fisik yang berlangsung dari tahun 1945-1950. Disaat revolusi fisik itu pula, Abdul Karim Oey membentuk sebuah partai di Bengkulu, yakni partai Masyumi. Abdul Karim Oey selaku ketua umum, dengan M. Yusuf sebagai wakil ketua dan Saleh Nasution sebagai sekretarisnya. Partai ini bertahan sampai dengan tahun 1960.⁴⁸ Pada saat revolusi fisik, selain menjadi ketua umum partai Masyumi Bengkulu. Abdul Karim Oey juga menjabat beberapa kedudukan, seperti Konsul Muhammadiyah Bengkulu, anggota DPD Bengkulu, serta kawan dari Soekarno, turut menjadi buronan bangsa asing yang merasa akan mengancam upaya bangsa asing kembali memasuki Indonesia. Abdul Karim Oey bergabung dengan para pejuang dalam perang gerilya. Ketika itu, Abdul Karim Oey bergerilya masuk ke dalam hutan pedalaman Bengkulu.⁴⁹

Pasca gencatan senjata, partai Masyumi mengutus seorang utusan yakni Teuku Akbar untuk mencari Abdul Karim Oey yang sedang bergerilya di Muara Aman, yang kemudian mengajak Abdul Karim Oey agar menghadiri rapat di Bengkulu. Setibanya di ruang rapat, Abdul Karim Oey dimintai pandangan sebagai ketua umum partai Masyumi mengenai pembentukan negara federal yang sebelumnya sudah disetujui akan dibentuk di Bengkulu ini. Mengetahui hal tersebut, Abdul Karim Oey menolak untuk memberi pandangan. Pasalnya, menurut Abdul Karim Oey hal demikian

⁴⁸ Oey, "Di Wawancarai Oleh Sekar Nur Astuty."

⁴⁹ Merri Sri Hartati, Hardiansyah, and Sidiq Aulia, *Jejak Tokoh Tionghoa Di Muhammadiyah Bengkulu: Rekam Jejak Dan Pemikiran Haji Abdul Karim Oey (Oey Tjeng Hien)* (Bengkulu: K-Media, 2020), 32.

sudah masuk pada pengkhianatan bangsa.⁵⁰ Karena membentuk Negara Federal Bengkulu bahkan tanpa pemberitahuan kepada pemerintah yang jelas-jelas masih ada. Dengan begitu, Abdul Karim Oey dengan jelas menolak adanya Negara Federal Bengkulu.

Berdakwah melalui PITI pada Masa Orde Lama dan Orde Baru

Kontribusi Abdul Karim Oey dalam pembauran etnis Tionghoa di Indonesia selepas masa revolusi fisik ialah berdakwah. Selepas Abdul Karim Oey memilih untuk mengundurkan diri sebagai konsul Muhammadiyah Bengkulu di tahun 1952. Kemudian, Abdul Karim Oey pergi meninggalkan Bengkulu menuju Jakarta guna menjalankan kepentingan partai Masyumi. Di Jakarta, Abdul Karim Oey kembali teringat akan pesan ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah dahulu yakni H. Ibrahim, yang mengamatkan dirinya untuk dapat memperhatikan dan merangkul saudara etnis Tionghoa. Umat Islam sudah lama berinteraksi dengan orang-orang Tionghoa di Indonesia justru belum bisa mengajak orang-orang Tionghoa ke agamanya, kalah jika dibandingkan dengan zending dan missi Nasrani. Yang mana mereka giat dalam mengajak orang-orang Tionghoa agar memeluk agama Nasrani. Berbanding terbalik dengan Muhammadiyah yang berdakwah hanya fokus kepada keluarga Muhammadiyah saja. Amanat yang diberikan tersebut memberikan beban moril kepada Abdul Karim Oey, yang selanjutnya amanat tersebut harus direalisasikan.⁵¹

Pada tahun 1953 di Jakarta, Abdul Karim Oey mengajak Yap A. Siong dan Soei Ngo Sek (Abdul Hamid) serta beberapa teman lainnya untuk mendirikan sebuah organisasi Tionghoa Islam. Akhirnya, disepakatilah pembentukan organisasi dengan nama Persatuan Islam Tionghoa (PIT).⁵² Dalam organisasi ini Abdul Karim Oey berlaku sebagai penasihat, Abdul Karim Oey lebih memilih untuk tidak menjadi ketua dalam organisasi ini. Semua biaya operasional organisasi ini ditanggung oleh Abdul Karim Oey. Selanjutnya, ditahun 1961 dilakukannya pergantian pengurus dari PIT dan pada tahun 1963, seorang teman yakni Kho Goan Tjin mendatangi Abdul Karim Oey dan bercerita bahwasannya Kho Goan Tjin memiliki sebuah perkumpulan yang bernama Persatuan Tionghoa Muslim (PTM), dan ia berkeinginan untuk menyatukan PTM dengan PIT. Pada tahun 1963, dibentuklah PITI (Persatuan Islam Tionghoa Indonesia) sebagai pergabungan dua perkumpulan tersebut.

PITI hadir sebagai wadah muslim Tionghoa yang ketika awal pembentukannya berhaluan politik kepada masyumi, dan membangun erat ikatan dengan Muhammadiyah. Hal ini terjadi karena, Abdul Karim Oey sebagai ketua pertamanya merupakan seorang Muhammadiyah asal Bengkulu. PITI mengalami pergantian kepengurusan lagi pada tahun 1967 dengan masa bakti

⁵⁰ Hien, *Mengabdi Agama, Nusa, Dan Bangsa: Sahabat Karib Bung Karno*, 113-114.

⁵¹ Oey, "Di Wawancarai Oleh Sekar Nur Astuty."

⁵² Serian Wijatno, "Di Wawancarai Oleh Sekar Nur Astuty," 2023.

1967-1969.⁵³ Di masa ini, Oey kembali menjadi ketua umum. Perkembangan PITI makin terasa, tatkala banyaknya dukungan yang diterima oleh PITI. Organisasi PITI dianggap sebagai salah satu organisasi yang mempercepat proses asimilasi yang memang sedang gencar disuarakan. Namun, dimasa itu juga PITI menemui ujiannya. Pada tanggal 10 April 1972, ketika Pimpinan Pusat PITI mengajukan permohonan kepada Menteri Agama untuk menerbitkan Al-Qur'an dan majalah dakwah dengan bahasa dan tulisan Tionghoa. Di samping itu, situasi di Indonesia tidak memperbolehkan adanya tulisan dengan aksara Tionghoa. Bersamaan dengan surat bertanggal 5 Juli 1972, No. MA/244/1972, oleh Menteri Agama H.A. Mukti Ali berisikan mengenai ditolaknya maksud PITI untuk menyetak Al-Qur'an dan majalah dalam bahasa Tionghoa. Alasan ditolaknya permintaan tersebut ialah karena permintaan tersebut dinilai akan melahirkan keekklusifan, sebab memakai bahasa Tionghoa.⁵⁴

Setelah menerima surat dari Menteri Agama, PITI dibubarkan pada tanggal 5 Desember 1972 melalui surat No.101/PP/Pb./1982. Sepuluh hari setelah pembubaran PITI. Melalui rapat luar biasa yang dilakukan oleh Dewan Pengurus Provinsi PITI, pada tanggal 15 Desember 1972. PITI menyampaikan surat dengan No.1/PP/Pb/'72 kepada Jaksa Agung Republik Indonesia yang berisi tentang pendirian organisasi yang bertujuan untuk berdakwah dan bergerak dalam bidang pendidikan, dengan nama Pembina Iman Tauhid Islam (PITI).⁵⁵ Penggantian nama dilakukan, akan tetapi struktur organisasinya sama tidak banyak perubahan. Dengan Kembali berdirinya PITI, maka organisasi ini berusaha untuk memantapkan langkah organisasinya dan menyesuaikan diri dengan pemerintahan Soeharto. Hal ini dilakukan semata-mata karena antara PITI dengan pemerintah mempunyai tujuan yang sama dalam menyelesaikan permasalahan etnis Tionghoa di Indonesia. Harapan baru PITI ialah bisa menjadi organisasi yang selain berkecimpung di bidang dakwah, juga ikut serta membantu pemerintah dalam mensukseskan pembangunan nasional, melalui asimilasi.⁵⁶

Keterlibatan Abdul Karim Oey dalam PITI merupakan tahap lanjutan atas Upaya pembauran yang dirinya lakukan. Setelah sebelumnya, Abdul Karim Oey lebih banyak membawa dirinya masuk ke dalam kelompok etnis mayoritas Indonesia. Maka, pada keterlibatannya di PITI membawa dirinya yang sudah dianggap sebagai "orang sendiri" ke dalam tubuh kelompok masyarakat etnisnya yakni Tionghoa. Abdul Karim Oey mencoba merangkul dan memfasilitasi orang-orang Tionghoa yang ada di Indonesia. Selain sebagai wadah berdakwah Islam, PITI juga terbuka terhadap orang-orang Tionghoa yang bukan muslim. Sebab, PITI menganggap lembaganya sebagai rumah bagi mereka orang-orang Tionghoa di Indonesia.

⁵³ Hien, *Mengabdi Agama, Nusa, Dan Bangsa: Sahabat Karib Bung Karno*, 117.

⁵⁴ Wijatno, "Di Wawancarai Oleh Sekar Nur Astuty."

⁵⁵ Hien, *Mengabdi Agama, Nusa, Dan Bangsa: Sahabat Karib Bung Karno*, 129.

⁵⁶ Wijatno, "Di Wawancarai Oleh Sekar Nur Astuty."

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ketua Umum PITI periode 2022/2027. Bahwasannya, PITI memiliki manfaat masing-masing bagi tiap orang. Bagi orang muslim Tionghoa, PITI sebagai wadah silaturahmi. Sebab muslim Tionghoa bisa saling memperkuat semangat dalam menjalankan agama Islam. Bagi orang etnis Tionghoa non-muslim, PITI dapat menjadi jembatan antara mereka dengan umat Islam. Bagi pemerintah, PITI dapat dijadikan sebagai komponen bangsa yang berperan strategis sebagai jembatan penghubung antar suku dan etnis, yang kemudian berguna untuk mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berkontribusi dalam Pendanaan beberapa Kepentingan Negara

Selain terlibat dalam dakwah melalui PITI, di masa orde baru Abdul Karim Oey juga banyak berkecimpung pada kegiatan ekonomi global. Abdul Karim Oey tidak semata-mata melakukan itu karena ingin memperkaya diri sendiri, melainkan digunakan untuk dakwah umat. Abdul Karim Oey sangat dermawan, dirinya bahkan tidak apa jika hartanya dipakai untuk pembangunan agama dan bangsa. Sebagaimana ketika masa orde lama, Abdul Karim Oey menyumbangkan sejumlah Rp. 75 Juta yang akan diperuntukan untuk pembiayaan Dwikora (Dwi Komando Rakyat). Selain itu Abdul Karim Oey juga terus berkontribusi pada beberapa kepentingan negara, sampai dengan masa akhir hayatnya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Serian Wijatno, selaku ketua umum PITI periode 2022-2027 bahwa Abdul Karim Oey terkenal sebagai orang yang peduli dengan kegiatan dakwah di kalangan masyarakat Tionghoa, dalam menyebarkan Islam di kalangan masyarakat Tionghoa, beliau juga di sejajarkan dengan tokoh-tokoh nasional pendiri dan pejuang atas berdirinya Republik Indonesia. Atas kontribusinya untuk kepentingan negara, pada 2006, pemerintah Republik Indonesia menganugerahkan Bintang Mahaputera kepada Abdul Karim Oey.

Gambar 5. Piagam Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera



Sumber: Koleksi Keluarga, repro oleh Sekar Nur Astuty, 21 Maret 2023

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa Abdul Karim Oey sebagai Tionghoa peranakan memiliki peran yang cukup berpengaruh dalam pembauran etnis Tionghoa di Indonesia. Beberapa keterlibatan Abdul Karim Oey ialah berkontribusi di Muhammadiyah ketika masa kolonial. Pada masa merebut kemerdekaan, Karim Oey turut andil dalam Penolong Korban Perang (PEKOPE). Mengambil peran dalam dunia politik dengan bergabung ke partai Masyumi dan pemerintahan orde lama. Lepas dari kehidupan politik, Karim Oey berdakwah melalui organisasi PITI dengan merangkul orang-orang Tionghoa setelah sebelumnya banyak membaurkan dirinya secara personal ke dalam Masyarakat mayoritas. Dalam bidang perekonomian, Abdul Karim Oey turut berkontribusi dengan mendanai kepentingan negara, seperti pembentukan Dwikora. Abdul Karim Oey menjadi salah satu orang Tionghoa yang sudah menjadi satu dengan Indonesia. Asal-usul garis keturunannya memang berasal dari Tiongkok. Namun, dengan penuh cinta Karim Oey merasa bahwa Indonesia adalah negaranya.

REFERENSI

- Agung, Surya. *Agamaku Terbang Tinggi*. Surabaya: Inspirasi, 2001.
- Amalia, Ade Fitri. "Toleransi Beragama Dalam Praktek Sosial Masyarakat Mayoritas Dan Minoritas Agama Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember." *Al-Isnad: Journal of Islamic Civilization History and Humanities* 3, no. 30 (2022): 1–9.
- Babari, J, and Albertus Sugeng. *Diskriminasi Rasial Etnis Tionghoa Di Indonesia*. Jakarta: Gandi, 1999.
- Danyati, Ratna, and Samuel Budiman. "Peranan Sekolah Tiong Hoa Hwe Koan Dan Hollandsch Chinesesch School Terhadap Etnis Tionghoa." *Jurnal Cakrawala* 12, no. 1 (2012): 17–24.
- Gusria, Selpi. "Kiprah H. Abdul Karim (Oey Tjeng Hien) Dalam Bidang Sosial Keagamaan Di Bintuhan Pada Tahun 1926-1938." Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2019.
- Ham, Ong Hok. *Riwayat Tionghoa Peranakan Di Jawa*. 2nd ed. Jakarta: Komunitas Bambu, 2009.
- Hartati, Merri Sri, Hardiansyah, and Sidiq Aulia. *Jejak Tokoh Tionghoa Di Muhammadiyah Bengkulu: Rekam Jejak Dan Pemikiran Haji Abdul Karim Oey (Oey Tjeng Hien)*. Bengkulu: K-Media, 2020.
- Hien, Abdul Karim Oey Tjeng. *Mengabdi Agama, Nusa, Dan Bangsa: Sahabat Karib Bung Karno*. 1st ed. Jakarta: Gunung Agung, 1982.
- Hoon, Chang Yau. *Chinese Identity in Post-Suharto Indonesia: Culture, Politis and Media*. Brighton: Sussex Academic, 2011.
- Isnaeni, Noor. "Perkembangan Pendidikan Anak-Anak Tionghoa Pada Abad 19 Hingga Akhir Orde Baru Di Indonesia." *Khasanah Ilmu: Jurnal Pariwisata dan Budaya* 3, no. 2 (2012).
- Jahja, Junus. *Islam Di Mata WNI*. Jakarta: Yayasan Haji Karim Oei, 1993.
- Jusuf, Iskandar. *Jalan Panjang Asimilasi Etnis Tionghoa*. Tangerang: Sekolah Terpadu Paho, 2016.
- Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2005.

- M. D, La Ode. *Trilogi Pribumisme: Revolusi Konflik Pribumi Dengan Non-Pribumi Di Berbagai Belahan Dunia*. 1st ed. Jakarta: Komunitas Ilmu Pertahanan Indonesia, 2018.
- Muharam, Beni Ahmad. “Operasi Detachment: Operasi Militer Amerika Serikat Dan Iwo Jima (19 Februari - 26 Februari 1945).” Universitas Pendidikan Indonesia, 2018.
- Oey, Ali Karim. “Di Wawancarai Oleh Sekar Nur Astuty,” 2023.
- Poesponegoro, Marwati Djoened, and Nugroho Notosusanto. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid 2*. Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- Rochmawati. “Pembauran Yang Tak Pernah Selesai.” *Jurnal Masyarakat dan Budaya* 6, no. 2 (2004): 105–118.
- Romli, Komsahrial. “Akulturasi Dan Asimilasi Dalam Konteks Interaksi Antar Etnis.” *Jurnal Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 8, no. 1 (2015).
- Sekretariat Jendral DPR RI. “Tentang Sejarah DPR.” *Website Instansi*.
- Soyomukti, Nurani. *Soekarno & Cina: Nasionalisme Tionghoa Dalam Revolusi Indonesia, Soekarno Dan Poros Jakarta-Peking, Sikap Bung Karno Terhadap Etnis Tionghoa Di Indonesia*. Yogyakarta: Garasi, 2012.
- Suhaedi, H. S, Yanwar Pribadi, Ade Fakhri Kurniawan, and Dedi Suhardi. *Etnis Cina Di Banten*. Banten: LP2M IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2015.
- Suryadinata, Leo. *Etnis Tionghoa Dan Nasionalisme Indonesia: Sebuah Bunga Rampai 1965-2008*. Jakarta: Kompas, 2010.
- . *Peranakan's Search for National Identity: Biographical Studies of Seven Indonesian Chinese*. Singapore: Times Academic Press, 1993.
- . *Pribumi Indonesians, The Chinese Minority and China*. 3rd ed. Singapore: Heinemann Asia, 1992.
- . *Prominent Indonesian Chinese: Biographical Sketches*. Singapore: institute of Southeast Asian Studies, 1995.
- . *Prominent Indonesian Chinese in The Twentieth Century: A Preliminary Survey*. Ohio: Center for International Studies Ohio University, 1972.
- Tan, Mely G. *Etnis Tionghoa Di Indonesia: Kumpulan Tulisan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Wijatno, Serian. “Di Wawancarai Oleh Sekar Nur Astuty,” 2023.